

**PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN  
SENKETA PERWAKAFAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
(S.H.I) pada Jurusan Peradilan Agama Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**SUTHRISNA. HS**  
**NIM : 10100106040**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*” adalah karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat atau tiruan atau dibuatkan oleh orang lain, maka skripsi dan gelar diperoleh kerananya, batal demi hukum.

Samata, April 2013

Penulis,

Suthrisna. HS



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Skripsi ini berjudul ***“Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”*** dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum islam di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing HT.,M.S, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. A. Intan Cahyani, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang tidak jenuh menyalurkan pengetahuannya untuk menyempurnakan karya tulis ini.
6. Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd, selaku Pembimbing II, yang selalu menyempatkan waktu untuk memberikan solusi cerdas dalam pembuatan karya tulis ini.
7. Seluruh pihak yang memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Terakhir, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Drs. H. Sutiardin** dan Ibunda **Haisya Haya**, yang selalu memberikan dorongan baik moril, materil dan spiritual. Ananda minta maaf yang sebesar-besarnya akan keterlambatan penyelesaian studi ini, tapi Ananda akan selalu berusaha membahagiakan Ayanda dan Ibunda. Semoga semuanya yang turut andil dalam penulisan ini diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat, Amin.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Samata, April 2013

Penulis,

Suthrisna. HS

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II. DESKRIPSI TENTANG HAKIM PENGADILAN AGAMA.....</b>	<b>14</b>
A. Hakim Pengadilan Agama.....	14
B. Tugas dan Kewenangan Hakim di Lingkungan Badan Pengadilan Agama.....	17
C. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan permasalahan dalam Masyarakat.....	22
<b>BAB III. PERWAKAFAN DI INDONESIA.....</b>	<b>31</b>
A. Sistem Perwakafan di Indonesia.....	31
B. Problematika Perwakafan di Indonesia.....	38
C. Tinjauan Yuridis Perwakafan.....	44
<b>BAB IV. SENGKETA WAKAF DAN PENYELESAIANNYA.....</b>	<b>53</b>
A. Penyebab Terjadinya Sengketa Perwakafan di Indonesia.....	53
B. Langkah-langkah Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Perwakafan.....	56
C. Pandangan Undang-Undang Mengenai Perkara Perwakafan.....	60

<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>65</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



**PERANAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERWAKAFAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
(S.H.I) pada Jurusan Peradilan Agama Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**SUTHRISNA. HS**  
**NIM : 10100106040**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”*. Yang telah di susun oleh saudara **Suthrisna. HS**, Nim : **10100106040** Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada **Hari Jum’at tanggal 19 April 2013 M** bertepatan dengan **8 Jumadil Akhir 1434 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam (S.H.I)** Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 19 April 2013 M  
8 J. Akhir 1434 H

### DEWAN PENGUJI (SK.Dekan No. 157 Tahun 2013)

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Kasjim, SH., M.Th.I	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Drs. M. Sabir Maidin, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh :  
Dekan Fak. Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA  
19570414 198603 1 003



**NAMA : SUTHRISNA. HS**  
**NIM : 10100106040**  
**JURUSAN : PERADILAN AGAMA**  
**JUDUL : Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan**

---

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan, penyusun menentukan judul ini untuk dibuat suatu skripsi sebab yang terjadi pada realitas sosial yaitu pengetahuan masyarakat tentang perwakafan masih minim, sebab ketika seorang menyatakan bahwa tanah atau barang milik dia (wakif) diwakafkan kepada nadzir, akan tetapi tanpa adanya keabsahan atau bentuk tanda bukti bahwa tanah atau barang tersebut telah diwakafkan secara resmi kepada nadzir, dikhawatirkan keturunan atau salah satu pihak dari keluarga wakif melakukan dengan tidak ada persetujuan dari pihak keluarga, maka tanah atau barang tersebut akan batal demi hukum. Apalagi ketika pihak keluarga ini memegang suatu tanda bukti berupa Surat Tanah.

Dari pembahasan tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama yaitu bagaimana persengketaan dalam perwakafan dapat diatasi dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk tidak terjadi lagi sengketa dalam perwakafan dikemudian hari?

Sistem perwakafan di Indonesia masih jauh dari kesempurnaan dalam pengaplikasiannya, itu dibuktikan dengan adanya data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012 bahwa obyek wakaf tesebar di 420.003 lokasi dengan luas 3.500 kilometer persegi. Dari total jumlah terebut 67,22% atau 282.321 lokasi atau bidang tanah sudah bersertifikat wakaf, maka masih ada 32,28% atau 137.682 lokasi atau bidang tanah yang belum bersertifikat wakaf. Melihat data tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama harus memaksimalkan kerjasama dengan perangkat daerah yang ditunjuk sebagai PPAIW seperti KUA setempat dan perangkat daerah lainnya untuk meretas masalah kekurangan berkas-berkas dalam perwakafan tersebut yang masih terlalu banyak bidang tanah wakaf belum bersertifikat wakaf, agar harta benda wakaf tersebut tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang Hakim Pengadilan Agama untuk meretas ketika ada persengketaan, salah satunya yaitu lebih memaksimalkan pemeriksaan berkas-berkas yang berperkara dan memaksimalkan kerjasama dengan perangkat daerah yang ditunjuk sebagai PPAIW untuk melaksanakan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, apalagi dalam Undang-Undang tersebut membahas tentang pidana bagi orang yang menyelewengkan harta benda wakaf yaitu pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia termasuk Negara yang sedang berkembang, begitupun hukum yang ada di dalamnya dan terus menerus di bangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa hukum masyarakatnya. Tentu saja, hukum Islam begitu sangat berperan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Upaya pembangunan hukum Islam melibatkan tiga komponen yang dikenal dengan istilah “Tri Dharma Hukum”, yaitu:

- 1) Komponen perangkat hukum
- 2) Komponen penegak hukum
- 3) Komponen kesadaran hukum.<sup>1</sup>

Komponen-komponen di atas merupakan pembahasan yang lengkap dan tuntas. Akan tetapi, membatasi pembahasan tentang komponen-komponen hukum yaitu tentang komponen penegak hukum, bukan berarti pembahasan komponen hukum yang lain itu tidak penting. Dalam pembahasan ini, yang akan menjadi pembahasan sentral pembahasan adalah komponen penegak hukum sambil mengaitkan komponen-komponen yang lainnya.

Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama yang terjun langsung melaksanakan proses hukum akan mengalami dilema persoalan yaitu di satu sisi dia harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku kemudian diberlakukan dan di sisi lain dia harus memperhatikan dan memperhitungkan

---

<sup>1</sup> Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta : Departemen Agama R.I, 1985), h. 2

tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat-perangkat hukum tersebut.<sup>2</sup> Konsep distribusi pemahaman hukum terhadap keadilan intinya mempunyai dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: 1) Sistem hukum seharusnya dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan; dan 2) Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun secara kelompok.

Berbicara mengenai akses terhadap keadilan, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemenuhan hak masyarakat atas akses kepada keadilan tersebut mengingat keadilan identik dengan produk badan kehakiman, dalam hal ini pengadilan. Peran Pengadilan Agama tersebut semakin tambah krusial lagi jika dilihat dari kewenangannya dalam hal menangani perkara hukum keluarga dari penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, peran ini akan dapat dijalankan dengan baik apabila pembinaan dan pengawasan dalam berperadilan dilakukan dengan baik pula.

Untuk mewujudkan harapan hukum yang nyata, sehingga kebenaran, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum tercipta ditengah-tengah kehidupan individu maupun masyarakat baik demokrasi, dan transparansi hukum kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus sempurna, harus diberi kepercayaan untuk melakukan yang terbaik dan untuk membenahi diri, jangan selalu diliputi pemikiran negatif. Amanat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 40.

Republik Indonesia. Ditegaskan dalam penjelasannya bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.

Kekuasaan kehakiman sangat kuat, bersih dan berwibawa tidak hanya cukup dengan adanya dukungan dari perangkat perundang-undangan saja, tapi juga adanya kesiapan dan kemampuan peranan para hakim dalam menentukan dan menerapkan semua aturan hukum yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut menguasai ilmu hukum (*learned in law*), tapi juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan penerapan hukum (*skill in law*) di depan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa hakim tidak hanya dalam ruang lingkup pemahamannya tentang hukum, tapi juga harus memahami kondisi hukum di masyarakat dan mempraktekkan hukum secara adil dan konsisten.

Istilah “Peranan” di sini menjelaskan bahwa setiap orang menjadi pelaku di dalam masyarakat sesuai dengan tempat tinggalnya. Selain itu, peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan yang akan mempunyai konsekuensi ketika dilalaikan. Tugas seorang hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, kemudian fungsi dari seorang hakim adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan peran seorang hakim adalah menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diembannya dengan melihat kondisi-kondisi lingkungan masyarakat. Dalam artian bahwa hukum merupakan olah pikiran manusia atas nilai-nilai agama dalam mengatur kehidupan itu sendiri dan harus diingat bahwa hukum itu bersifat *ambivalent* yaitu menunjukkan dua sifat, yang pertama menunjukkan kepastian hukum dan kedua menunjukkan kekuatan hukum, sebab ketika

seseorang menetapkan sesuatu harus dilandasi dengan kebenaran, kepastian dan bukti konkrit sebagai penguat landasannya.

Merujuk kepada asumsi-asumsi yang telah dipaparkan di atas bahwa Indonesia adalah Negara yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, kemayoritasan inilah sehingga wajar ketika kita memahami dengan seksama bahwa yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama Islam itu adalah mengajarkan kita tentang bagaimana menyambung tali persaudaraan dan juga bagaimana membentuk pengabdian diri kepada Allah Swt.

Sejalan penjelasan di atas, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam untuk Allah Swt karena dalam ajaran agama Islam bukan hanya menjelaskan bahwa hal yang sakral dalam pelaksanaan ibadah seorang muslim hanyalah tentang shalat saja, tapi mengajarkan kita untuk saling berbagi. Maka dari itu, hadirilah wakaf yang bentuknya memberikan suatu barang berharga (harta) yang sifatnya kekal dan bisa dipakai selama-lamanya dan dapat diberikan kepada seseorang untuk dipergunakan dengan jalan yang halal, karena harta yang kita pegang tidak mutlak bahwa barang yang hasil dari keringat kita sendiri itu adalah milik kita sepenuhnya, akan tetapi menurut ajaran Islam di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain.

Sesuai dengan fungsi Hukum Islam yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Dasar hukum yang menganjurkan prospektif ini antara lain:

Firman Allah dalam Q.S Ali-Imran (3) : 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”<sup>3</sup>.

Selain itu, untuk menunjang prospektif wakaf ini bersumber pula dari ajaran Rasulullah Saw yang mengutamakan konsep shadaqah jariyah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

Artinya:

Dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Nabi Saw, telah bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara : (1) sedekah (wakaf), (2) ilmu yang beranfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang-mengarang dan sebagainya’.” (Riwayat Jama’ah ahli hadis, selain Bukhari dan Ibnu Majah” (Riwayat Jama’ah ahli hadis, selain Bukhari dan Ibnu Majah)<sup>4</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia banyak melakukan penyimpangan baik itu dari segi peruntukannya maupun pengurusannya, sehingga banyak menimbulkan sengketa antara ahli waris (*wakif*) dan orang yang mengurus wakaf dari *wakif* (nazhir).

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 77

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet.52; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 341

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penyusun mengajukan suatu pokok permasalahan yang merupakan landasan dalam kajian skripsi ini adalah: “Bagaimanakah peranan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perwakafan?”

Untuk mengkaji masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana sistem perwakafan dan sengketanya di Indonesia?
2. Bagaimana langkah-langkah Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perwakafan?

## **C. Pengertian Judul**

Judul skripsi ini adalah Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan, untuk menghindari *miss interpretation* dalam memahami istilah atau kata-kata judul tersebut, maka penulis akan mengemukakan pengertian beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:

*Peranan* dalam Kamus Ilmiah Populer berarti fungsi, kedudukan, bagian kedudukan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

*Hakim* dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili sengketa dalam pengadilan atau mahkamah; orang yang menghakimi, memutuskan sengketa, mengadili sesuatu, bertindak sebagai hakim, orang yang

---

<sup>5</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Cet. I; Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h. 225

pandai dan bijaksana.<sup>6</sup> Kemudian dalam Kamus Hukum dikemukakan bahwa *Hakim* adalah seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.<sup>7</sup>

*Pengadilan Agama* adalah lembaga hukum yang mempunyai wewenang atau otoritas untuk memberikan putusan terhadap sengketa-sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>8</sup>

*Sengketa* dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia adalah pertengkar, perselisihan, pertikaian.<sup>9</sup>

*Wakaf* yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian harta kekayaan yang merupakan tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan pribadatan atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>10</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penyusun, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini belum pernah dibahas oleh penyusun lain sebelumnya. Oleh karena itu, penyusun berusaha untuk mengkaji pokok masalah dengan pembahasan yang mendalam sehingga dapat dirumuskan suatu konsep atau teori yang aktual tentang perwakafan hingga akhirnya dapat dipublikasikan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan di lingkungan Hakim Pengadilan Agama pada khususnya.

---

<sup>6</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Realty Publisher, 2008), h. 105.

<sup>7</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 136

<sup>8</sup> Deden Effendi, *op. cit.*, h. 5

<sup>9</sup> Tim Reality, *op. cit.*, h. 301

<sup>10</sup> Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembahasan Tanah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 73



Pada pembahasan skripsi ini, penyusun memanfaatkan berbagai macam literatur yang relevan dengan pokok masalah yang akan dikaji, diantara literatur tersebut adalah:

1. Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama disusun oleh Deden Effendi, penjelasan umumnya yaitu bagaimana seorang Hakim yang memegang erat tongkat keadilan dengan memperlihatkan sifat keprofesionalannya dalam memutuskan bagi yang bersengketa, tidak memandang baik dari segi materi, jabatan ataupun pertalian keluarga.
2. Hukum perwakafan di Indonesia, yang disusun oleh Suparman Usman membahas tentang wakaf baik dari segi definisi, dasar hukum, macam-macam wakaf, unsur dan syarat, nadzir, serta kedudukan dan perubahan dari wakaf. Dalam buku ini hanya menguraikan bagaimana wakaf itu bisa menjadi hal yang produktif.
3. Fiqh Islam, yang disusun oleh H. Sulaiman Rasjid, buku yang disusun beliau membahas tentang tatacara beribadah yang baik dan benar, baik itu mengenai shalat, puasa, zakat, wakaf, dll menurut ajaran Rasulullah Saw, sehingga dalam menjalankan ibadah kepada Sang Khaliq hati menjadi damai dan tentram, penyusun mengambil penjelasan dari buku ini karena pembahasan dalam buku ini ada sebagian lembarannya membahas tentang Perwakafan yang juga disandari bahwa melakukan perwakafan itu adalah suatu bentuk ibadah kepada Tuhan.
4. Manajemen Wakaf Produktif, yang disusun oleh DR. Mundzir Qahaf, di dalam buku ini beliau membahas tentang sistem baru dalam

pengelolaan wakaf dengan menghasilkan manajemen investasi dan manajemen properti. Dengan demikian, arah investasi lembaga wakaf jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik properti, uang langsung maupun tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi sekalipun dibentuk oleh pihak lain, asalkan tetap sejalan dengan hukum syariat Islam.

5. Panduan mengurus sertifikat tanah, yang disusun oleh Jimmy Joses Sembiring, SH., M.Hum, beliau menjelaskan tentang proses untuk mendapatkan sertifikat tanah yang dari hak milik menjadi hak guna bangunan, karena sertifikat adalah tameng atau bukti yang kokoh untuk melindungi tanah yang menjadi hak guna bangunan dari orang yang mengaku keturunan dari pemilik tanah tersebut, hak guna bangunan seperti sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya yang berbentuk ibadah dan pendidikan.

Meskipun ada beberapa referensi dan karya ilmiah yang dapat menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan pembahasan penyusun, tapi masih kurang referensi dan karya ilmiah yang khusus mengkaji tentang peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, memuat tentang tinjauan yuridis perwakafan dan bagaimana peran hakim dalam menyelesaikan sengketa perwakafan. Olehnya itu, penelitian ini sangat urgen untuk ditindak lanjuti.

## ***E. Metode Penelitian***

### **1. Jenis dan lokasi penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memakai jenis penelitian deskriptif analisis yang bersifat kuantitatif yaitu metode dengan cara pencarian data atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti, kemudian mengumpulkan referensi dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan sebagai dasar pegangan untuk memenuhi penyusunan skripsi ini.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Sesuai jenis penelitian yang sifatnya kuantitatif, maka lokasi penelitian ini tidak seperti kualitatif yang turun ke lapangan atau dimasyarakat dengan cara wawancara untuk mengumpulkan data, akan tetapi aktifitas penelitian ini banyak dilakukan di perpustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data melalui referensi-referensi yang terkait dengan permasalahan skripsi ini kemudian dikaji, sehingga menghasilkan solusi atau jawaban dari permasalahan tersebut.

### **2. Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Syar'i**

Pada proses penyusunan pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan syar'i yaitu pembahasannya tidak terlepas dari pokok masalah yang dikaji menyangkut perwakafan yang merupakan salah satu kajian dari hukum Islam.

#### **b. PendekatanYuridis**

Selain itu juga digunakan tinjauan yuridis tentang perwakafan yang mendeskripsikan tinjauan-tinjauan hukum perwakafan dalam menyelesaikan sengketa perwakafan.

c. Pendekatan Normatif

Mengenai pendekatan pada proses penyusunan skripsi ini, penyusun juga menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadis), terutama yang berkaitan dengan Hakim Pengadilan Agama sebagai pembena dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

d. Pendekatan Sosiologis

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun juga menggunakan pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang diupayakan dengan melihat fakta, gejala serta perubahan-perubahan sosial, khususnya peran Hakim Pengadilan Agama terhadap persengketaan wakaf yang merupakan obyek penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan *Library Research*, yaitu mengumpulkan data dengan dasar logis, konsep dan referensi-referensi yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sehingga keterangan dalam pembahasan mengenai perwakafan dapat diperoleh dengan hasil yang maksimal.

#### 4. Pengelolaan dan Analisis Data

Penulis menggunakan metode dengan cara mendeskripsikan konsep peran Hakim Pengadilan Agama dalam bidang perwakafan. Adapun kerangka berfikir yang digunakan untuk menjadi penopang pengelolaan dan analisis data ini adalah:

- a. *Induksi*, yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat konkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Artinya, bahwa penyusun berusaha memaparkan peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan yang kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. *Deduksi*, yaitu bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian di analisa berdasarkan data yang bersifat khusus. Artinya, bahwa ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Nash dan Undang-Undang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisa status peran Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan.

#### F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Hakim yang ditunjuk sebagai pemegang tongkat keadilan, bisa turun ke lapangan untuk melihat langsung persengketaan di masyarakat karena ketika Hakim turun ke lapangan untuk menyelesaikan sengketa, maka Hakim akan mendapatkan bukti materil.

- b. Memaksimalkan kinerja Hakim Pengadilan Agama dalam keperdataan khususnya dalam bidang perwakafan.
- c. Memaksimalkan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 67 tentang pidana bagi yang menyelewengkan harta benda wakaf.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini yaitu :

- a. Agar penyusun mengetahui perkembangan perwakafan di Indonesia khususnya menyangkut hal yang dapat menjadi sengketa dalam perwakafan.
- b. Agar mengetahui sejauhmana kinerja Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perwakafan.

## BAB II

### DESKRIPSI TENTANG HAKIM PENGADILAN AGAMA

#### A. *Hakim Pengadilan Agama*

Hakim berasal dari kata Bahasa Arab yakni **حاكم- يحكم- حاكم**, sama artinya dengan qadi' berasal dari kata **قضى - يقضى - قاضى** artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.<sup>1</sup> Adapun pengertian menurut syar'i atau secara terminologi yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>2</sup> Sesuai dengan dalil yang termaktub dalam Kitab Suci Al-qur'an Q.S. An-Nisa (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahanya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha Fil Islam* (Kairo, 1970), h. 11

<sup>2</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet I ; Semarang : PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 29

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 113

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim (berfikir secara logis serta bijak menetapkan sesuatu) dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, idealisasi hakim tercermin dalam simbol-simbol *Kartika* (taqwa), *Cakra* (adil), *Candra* (bijaksana), *Sari* (berbudi luhur) dan *Tirta* (jujur). Sifat-sifat yang abstrak seperti itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkrit, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap perilaku hakim, sikap dalam kedinasan itu mencakup:

1. Sikap Hakim dalam persidangan,
2. Sikap Hakim terhadap sesama sejawat,
3. Sikap Hakim terhadap bawahan atau pegawai,
4. Sikap Hakim terhadap utusan,
5. Sikap pimpinan terhadap bawahan atau rekan Hakim dan
6. Sikap Hakim terhadap instansi lain.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet II ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 180

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, h. 181



Peradilan Agama, untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
6. Lulus pendidikan hakim;
7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Semua persyaratan itu menunjukkan, bahwa suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dan ketentuan berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam delapan dari sepuluh persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat kedua dan kelima hanya berlaku

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Peradilan Agama Edisi Terbaru (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2012), h. 121

bagi calon hakim pada pengadilan dan lingkungan Peradilan Agama yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan peradilan itu di Indonesia, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut Hukum Islam dikalangan orang-orang yang beragama Islam.

## ***B. Tugas dan Kewenangan Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama***

### **1. Tugas Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama**

Di dalam peradilan, tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya.

Kemudian dalam suatu penegakan hukum peranan Hakim Pengadilan Agama meliputi:

1. Mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum.
2. Mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut dalam kaitannya dengan perubahan sosial.
3. Mengupayakan efektifitas hukum tersebut di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangnya yang mengatur masalah tersebut. Dalam mengatasi mengatasi hal ini, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada pertauran-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Mengatasi hal ini seorang hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup

---

<sup>7</sup> Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta : Departemen Agama R.I, 1985), h. 26

ditengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan “kekosongan hukum”.

Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan Indonesia”.<sup>8</sup>

Aktifnya seorang hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya keberhasilan dalam mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim juga bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diajukan kepada hakim diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya : Karina, 2004), h. 13

luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.

Sifat hakim yang telah dikemukakan diatas, juga terdapat sikap seorang hakim yang proporsional menjunjung tinggi suatu amanah seorang pencari keadilan ditengah-tengah umat yang berperkara dengan didukung oleh *stakeholder* yang dilandasi dengan dua hal utama yaitu kebaikan (*al-birr*) dan takwa.<sup>9</sup> Dua hal tersebut akan mengantarkan seorang hakim menuju suatu tindakan keadilan dalam menghadapi persoalan umat.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan merupakan suatu hal yang harus dilakoni sang hakim agar mata, hati dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tapi berdasarkan naluri keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping lahiriyah, terdapat juga tanggung jawab yang bersifat batiniyah untuk seorang hakim yaitu:

“Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>10</sup>

Melihat wacana yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad, maka suatu hal yang harus dijunjung tinggi oleh seorang hakim adalah rasa tanggungjawab penuh atas apa yang diembannya sebagai pemegang tongkat

---

<sup>9</sup> Dikutip dari Makalah Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M, disampaikan pada kuliah umum Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar, tanggal 21 Oktober 2011, h. 7

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum acara Perdata Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), h. 37

keadilan dan sebagai perwakilan Tuhan untuk mengadili manusia yang mempunyai kesalahan, dengan tidak memandang sepihak dan tidak pandang bulu dalam menetapkan hukum ketika ada persengketaan yang diperhadapkan. Dalam artian segala perkara yang dipegang oleh hakim sebagai pengejar kebenaran materil secara mutlak dan harus dituntaskan.

Dengan demikian kedudukan hakim yaitu sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup> Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan juga berpengalaman dalam bidang hukum, serta bagi seorang dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Selain itu, adapun kewajiban hakim menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, adalah :

1. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:
  - a. Azas Negara berdasarkan atas keTuhanan Yang Maha Esa.
  - b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 4 ayat 1).
2. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *op.cit.*, h. 35

3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan sesuai dengan kesalahannya. (Pasal 28 ayat 2).

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup> Pada masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan wewenang sendiri-sendiri untuk mengadili (*atributie van rechtsmacht*), dan ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Kekuasaan atau wewenang pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas wewenang relative (*relative competentie*) dan wewenang mutlak (*absolute competentie*).<sup>13</sup> Wewenang relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relative pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan undang-undang

Daerah hukum dari Pengadilan Agama meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten dan daerah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah provinsi.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *op.cit.*, h. 10

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri., *op. cit.*, h. 204

Sedangkan wewenang mutlak berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Wewenang Pengadilan Agama itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 di nyatakan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari’ah”.<sup>14</sup>

### ***C. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan permasalahan dalam Masyarakat***

Keterkaitan antara sistem hukum dengan masyarakat menunjukkan, bahwa tampaknya dimanapun tidak ada sesuatu sistem hukum yang lahir ke dalam suatu kehampaan. Masing-masing terlahir kedalam suatu kerangka ruang, kerangka kurun waktu dan kerangka sosial-budaya tertentu. Singkatnya, bahwa setiap sistem hukum mempunyai konteks pada lingkungan tertentu.

Apabila suatu sistem hukum akan diberlakukan dalam suatu konteks lingkungan yang lain, maka lingkungan tersebut harus diperhitungkan atau difikir secara matang ketika memberlakukannya dilingkungan lain. Dalam hal ini, jika sistem hukum tersebut akan diberlakukan dengan baik dan diindahkan oleh lingkungan tersebut, maka pemberlakuan tersebut sebagai hal yang resmi untuk diberlakukan. Kerangka pikir yang demikian, pada gilirannya akan mengandaikan suatu kenyataan, bahwa identitas yang sesungguhnya dari pada suatu sistem hukum akan mengambil bentuk pemberlakuan yang berbeda, sesuai dengan konteks lingkungan yang dihadapinya.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Peradilan Agama Edisi Terbaru, *op.cit.*, h. 94

Dapat dipastikan, bahwa hukum Islam lahir sebagai tesis alternative dari keadaan lingkungan yang hidup dan berkembang pada waktu itu. Oleh karena itu, Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw untuk senantiasa “membaca”. Dalam hal ini, membaca realitas sosial yang mengitarinya. Sebab, kelahiran hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari proses dialogis antara Nabi Muhammad Saw dengan lingkungan yang dihadapinya. Dengan kata lain, keakraban Nabi Muhammad Saw dengan lingkungannya tampak di dalam Hukum Islam itu sendiri, sebagai salah satu wujud penegasan identitas diri selaku Nabi dan Rasul.

Adanya Hukum Islam yang berwatak kemasyarakatan, maka suatu hal yang wajar ketika disandarkan dalam lembaga kemasyarakatan yang akan bertujuan menumbuh kembangkan hukum tersebut. Pendekatan kelembagaan demikian, mendorong Hukum Islam untuk senantiasa berhadapan dengan lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Dengan sendirinya, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan peradiban agama di dalam lingkungan yang dialaminya.

Dalam proses kenabian dan kerasulan, terlihat adanya suatu hubungan timbal balik antara turunnya wahyu dengan lingkungan yang dihadapi, yang dikenal dengan istilah “*ashbabun nuzhul*”. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, dapat dikemukakan bahwa Hukum Islam terbentuk dari atas, sekaligus terbentuk dari bawah. Dalam artian, bahwa Hukum Islam terwujud, baik oleh aspek-aspek yang bersifat *tas’iriyah* maupun oleh aspek-aspek yang bersifat *wad’iyah*. Hukum Islam terjadi karena “pewahyuan Ilahi”, akan tetapi dalam waktu yang sama, terjadi karena “responsi manusia” atas wahyu Ilahi tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Maulana Muhammad Ali, wahyu dalam bentuk rendah merupakan pengalaman universal manusia. Hal demikian berarti



pula, bahwa wahyu tersebut mengungkapkan “realitas yang benar” mengenai kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Aspek yang bersifat *wad'iyah*, sangat dipengaruhi oleh hakikat kejadian manusia itu sendiri, yaitu kekuatan dan kelemahan yang melekat didalam praktek hidupnya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa aspek *wad'iyah* dari Hukum Islam seringkali salah. Artinya, wahyu yang dibahasakan oleh manusia mempunyai kemungkinan untuk salah atau keliru, maka ketika *wad'iyah* di praktekkan dilingkungan masyarakat, seharusnya dibarengi oleh *tasri'iyah* yaitu bagaimana suatu permasalahan disandarkan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt.

Dalam keadaan demikian, Hukum Islam tidak hanya cukup dipelajari sebagai suatu “*Law in Book*”, tetapi harus dipelajari sebagai suatu “*Law in action*”. Artinya, Hukum Islam tidak bisa dikonsepsikan sebagai gejala normatif dan otonom, melainkan harus dikonsepsikan sebagai suatu gejala yang secara nyata berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya.

Hal ini seperti yang di utarakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai latar belakang suatu pergolakan hukum yang ada di masyarakat:

“(1) Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya bahwa tindakan dalam penegakan hukum itu hendaknya mengait kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan sebagainya; (2) Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan; (3) Penegakan hukum di sini akan terlibat kepada masalah-masalah pembuatan hukum dari pada hanya sekedar menjadi badan yang melaksanakan saja.”

---

<sup>15</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, alih bahasa R. Kaelan (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1980), h. 4

Oleh karena itu, dapat digambarkan bahwa hukum yang hidup merupakan yang dikonsumsi oleh masyarakat sebelum Hukum Islam tiba yang status hukumnya diberlakukan, baik dalam arti yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Artinya, sebagaimana dijelaskan oleh H.M. Syafaat Mintaredja:

1. Mempunyai “*Juridische Gelding*” (kekuatan yuridis) artinya apabila pembuatannya dilakukan lembaga-lembaga negara yang kompeten.
2. Mempunyai “*Sociologische Gelding*” (kekuatan berupa penerimaan masyarakat seluruhnya) dan
3. Mempunyai “*Philosophische Gelding*” (kekuatan berupa kebijakan dalam menetapkan hukum), yang tentunya sesuai dengan ukuran sebagai hukum atau sendi hukum yang baik.<sup>16</sup>

Atas dasar yang sama, dapat pula dikatakan bahwa tegaknya hukum ditentukan oleh ketiga persyaratan tersebut. Jika tidak, maka hukum tersebut menjadi suatu hukum yang mati, seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto:

Atas hukum yang berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum mati tadi hanya merupakan kaidah yang mati saja (*dode regel*). Kalau hukum berlaku hanya secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka mungkin hukum tersebut menjadi aturan pemaksa. Akhirnya, apabila hukum tersebut hanya berlaku secara filosofis, maka tadi hanya boleh disebutkan sebagai kaidah hukum yang di harapkan atau dicita-citakan.<sup>17</sup>

Dari sini dapat diketahui, bahwa kemampuan untuk melembagakan hukum dari masyarakat dapat berkaitan dengan kemampuan fleksibel hukum itu sendiri, demikian pula sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat untuk melembagakan hukum dapat berkaitan dengan ketidakmampuan fleksibilitas hukum itu sendiri. Bertolak dari pendekatan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya diresapi oleh Hukum Islam. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev:

---

<sup>16</sup> H.M. Syafaat Mintaredja, *Islam dan Politik dan Negara di Indonesia: Sebuah Renungan Pembaharuan dan Pemikiran* (Jakarta : Septanarius, 1976), h. 17

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Alumni, 1982), h. 14

“Hukum Islam tidak diambil alih secara penuh oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana nampaknya tidak pernah dilaksanakan secara sempurna oleh Dunia Islam dimanapun, pada dasarnya pengaruh Islam hanyalah pada masalah keluarga, perkawinan, dan beberapa segi waris, dan dalam hal ini pun masyarakat Indonesia mengambil dan memilih beberapa aturan tertentu yang kemudian di sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai kebudayaannya.”<sup>18</sup>

Menurut Prof. H.M. Daud Ali, di Indonesia berlaku hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu dapat dibagi dua:

*Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian Hukum Islam yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Pelaksanaannya tergantung kepada kuat lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai kaidah-kaidah Hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk melaksanakannya. *Kedua*, Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah (bagian) Hukum Islam yang mengatur hubungan Manusia dengan Manusia dan benda dalam masyarakat, yang termasuk dalam kategori Hukum Islam bidang Mua’alah. Bagian Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena dituangkan dalam undang-undang. Yang dimaksud adalah (misalnya) hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum wakaf. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis memerlukan bantuan penyelenggara Negara untuk menjalankan secara sempurna dengan misalnya mendirikan lembaga Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur sistem Peradilan Nasional di Negara kita.<sup>19</sup>

Maka dapat dikatakan, bahwa hukum merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan rekayasa sosial. Hal demikian bukan tanpa resiko, terutama bagi para Hakim Pengadilan Agama yang terlibat langsung di dalam penyelenggaraannya, yang mana disebabkan oleh kenyataan, bahwa upaya tersebut merupakan upaya yang tergesa-gesa. Paling tidak, didasarkan pada satu

---

<sup>18</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priyono (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 52

<sup>19</sup> H.M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan) : Latar Belakang, Tujuan dan Prospek Undang-Undang Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2002), h. 290-291

anggapan bahwa masyarakat Indonesia secara *stereo-type* termasuk kedalam masyarakat prismatik.<sup>20</sup>

Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat senantiasa diikuti oleh adanya kesinambungan yang menyertai perubahan itu. Meskipun demikian, perubahan struktural masyarakat, tidak senantiasa diimbangi oleh perubahan kultural masyarakat secara serentak.

Pengertian demikian diisyaratkan pula oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1, menjelaskan:

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini di maksudkan agar keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis, serta dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga merealisasikan hukum tidak mempunyai halangan dan rintangan. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Atas dasar yang sama, dapat dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah warga masyarakat yang dilengkapi dengan status dan peranan tertentu, yakni menegakkan Hukum Islam. Dalam tulisan ini, diartikan bahwa Hakim menjaga keselarasan fungsional antara komponen perangkat hukum dan

<sup>20</sup> Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung : Alumni, 1979), h. 55

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *op.cit.*, h. 7

komponen kesadaran hukum, sehingga tercipta suasana yang penuh keserasian antara ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat, fungsi hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat dan
2. Fungsi hukum sebagai sarana perencanaan masyarakat.

Hal demikian menyebabkan adanya keharusan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk senantiasa tanggap terhadap hakikat permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, penurunan fungsi hukum di dalam mengatasi permasalahan masyarakat di ukur secara kontekstual.

Akhirnya, efektifitas hukum bertalian dengan hasrat untuk menghidupkan hukum, baik dalam peta yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Dengan kata lain, hukum tersebut melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), dan /atau menciptakan (*Rechtsscheping*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas dasar inisiatif sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar. Untuk itu hakim senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih mendalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatar

belakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, pemikiran-pemikiran apa yang ada disana, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Putusan hakim yang demikian, akan dapat menjawab permasalahan utama sekarang ini.

Penemuan hukum perlu untuk hakim dalam memeriksa dan memutus perkara untuk menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena itu hukumnya tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Jadi pertama-tama hakim harus menggunakan hukum tertulis lebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas maka barulah hakim mencari dan menemukan hukum itu sendiri dari sumber-sumber lainnya.

Dalam tingkat model peranan, maka peranan Hakim Pengadilan Agama adalah peranan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis jangka pendek dan peranan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis jangka panjang. Model pertama mengarahkan Hakim Pengadilan Agama untuk menjadi tenaga professional yaitu memiliki keterampilan dalam menerapkan hukum positif. Sedangkan model kedua mengarahkan Hakim Pengadilan Agama untuk senantiasa melibatkan diri di dalam berbagai macam masalah sosial. Pada saatnya, bersama-sama ahli sosial lainnya, mampu menyusun dasar-dasar teori tentang hukum dan lingkungannya.

Idealnya, kedua model peranan tersebut tidak dipandang suatu hal yang bersifat dilematis. Akan tetapi, dipertemukan dalam suatu titik singgung tertentu, sehingga mampu menetapkan Hakim Pengadilan Agama sebagai tenaga professional, sekaligus tenaga perencanaan sosial. Dengan kata lain, Hakim Pengadilan Agama sosiokratis yaitu seorang hakim pengadilan agama yang mampu berfikir secara integral.



### BAB III

#### PERWAKAFAN DI INDONESIA

##### *A. Sistem Perwakafan di Indonesia*

Sebelum menjelaskan sistem perwakafan yang berlaku di Indonesia, terlebih dahulu kita simak definisi-definisi perwakafan. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab وقف yang artinya menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu.<sup>1</sup> Menurut istilah terdapat beberapa definisi mengenai wakaf, diantaranya:

- Golongan Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik *wakif* (orang yang mewakafkan) dan di sedekahkan adalah manfaatnya untuk kebajikan.<sup>2</sup>
- Golongan Imam Malik menyatakan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki *wakif*.<sup>3</sup>
- Golongan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda dan benda tersebut lepas dari penguasaan *wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), h. 80

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mugniah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999), h. 660

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 660

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 662



- Golongan Imam Hambali menyatakan bahwa wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan hak penguasaan terhadap itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wakaf menurut syar'i adalah menahan zat asal benda dan memanfaatkan hasilnya yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah Swt.<sup>6</sup>

Muhammad Jawad Mugniyah dalam bukunya "*al-Ahwal al-Syakhsyah*" menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.<sup>7</sup>

Sekian definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh para *fuqaha*, adapun fiqh klasik khusus di Negara Indonesia ini terdapat rumusan wakaf sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977, menyatakan bahwa:

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor: 41 Tahun 2004 di jelaskan bahwa:

---

<sup>5</sup> Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Cet I; Pasuruan : Garuda Buana Indah, 1994), h. 1-2

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet. II ; Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), h. 23

<sup>7</sup> Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat ; Ciputat Press, 2005), h. 9

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 10

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka penyusun dapat merumuskan bahwa ruanglingkup wakaf, yaitu:

1. Wakaf khusus, seperti kepada anak atau kerabat yang dikenal wakaf khusus, seperti harta benda wakaf merupakan milik seseorang atau sekelompok orang atau suatu badan hukum dan mempunyai hak penuh terhadap miliknya tersebut.
2. Objek atau benda wakaf bersifat kekal zatnya dan tidak habis apabila dimanfaatkan.
3. Benda atau objek wakaf dilepas kepemilikannya oleh pemilik sah benda atau objek wakaf tersebut.
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tidak dapat di hibahkan atau diwariskan.
5. Manfaat dari objek untuk benda wakaf ialah untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam dan benda atau objek wakaf tersebut pemanfaatannya berupa jangka panjang (awet).

Ada beberapa *nash* yang dijadikan landasan hukum wakaf yaitu Ayat Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw, yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat kebaikan dan saling tolong menolong dalam kebenaran, bersandarkan pembahasan wakaf yang berarti hal tersebut merupakan kebaikan dan juga terpuji.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 11

Ayat-ayat yang dapat dijadikan landasan hukum wakaf, antara lain:

a. Q.S. Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>10</sup>

b. Q.S. Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

<sup>10</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 67

“Kamu sekai-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>11</sup>

c. Q.S. Al-Hajj (22) : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>12</sup>

Adapun landasan hukum wakaf menurut anjuran Hadits Rasulullah Saw, antara lain:

H.R. Muslim dari Abu Hurairah

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya (tidak bertambah lagi

<sup>11</sup> Ibid., h. 91

<sup>12</sup> Ibid., h. 523

kebaikan amal itu), kecuali tiga perkara: 1) Sadaqah Jariyah (wakaf), 2) Ilmu yang bermanfaat, 3) Anak yang saleh yang mendo'akan ibu bapaknya.”<sup>13</sup>

a. H.R. Bukhari dan Muslim

وقف عمر رضي الله عنه أرضاً أصابها بخير بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروط،  
منها أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب وأن من وليها يأكل منها بالعرف ويطعم  
صديقاً غير متمول (رواه بخاري ومسلم)

Artinya:

“Umar r.a menafkahkan sebidang tanah yang ia dapatkan dari ganimah perang Khaibar atas perintah Rasulullah Saw, dan ia menentukan beberapa syarat, antara lain bumi tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, dan bagi orang yang mengurusnya berhak maka dari padanya secara baik-baik serta boleh memberi temannya makan dari padanya tanpa minta imbalan dari hartanya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>14</sup>

Berkaitan dengan beberapa hadits di atas, penyusun menanggapi sekaligus memberikan suatu gambaran bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan yang telah dipraktikkan oleh Nabi Saw dan para sahabatnya.

Inti dari penjelasan kedua hadits diatas bahwa praktek wakaf yang dianjurkan dengan adanya beberapa syarat yaitu obyek atau benda wakaf tidak boleh di perjual belikan, tidak boleh diwariskan untuk siapapun, tidak boleh dijadikan hibah untuk

<sup>13</sup> Abu Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Nasabury, Shahih Muslim, Juz II (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th.), h. 14

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru al-Gensindo, 1997), h. 341

oran lain dan juga tidak boleh merubah obyek wakaf kecuali mempunyai manfaat baik di dunia maupun diakhirat, karena sesungguhnya obyek atau benda yang diwakafkan itu mempunyai jangka waktu yang cukup lama.

Dalam sejarah hukum di Indonesia wakaf diatur dengan tiga instrumen hukum, yaitu: pertama dengan instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian yang kedua dengan instrumen Inpres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) lalu yang terakhir dengan instrumen Undang-Undang nomor 41 tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf serta mensiratkan kesungguhan pemerintah untuk memperkuat lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum. Namun Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena secara organik masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh undang-undang ini. Di samping itu juga perlu dipersiapkan SDM dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan undang-undang ini antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para Nadzir yang diperankan dengan baik.

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam persoalan wakaf, namun yang terpenting bahwa wakaf tersebut harus punya prinsip untuk kesejahteraan rakyat, karena kalau melihat sejarah dan praktek wakaf di zaman nabi Muhammad Saw ternyata keberadaan badan wakaf sangat potensial dan menentukan bagi kelancaran roda ekonomi pada saat itu.

## ***B. Problematika Perwakafan di Indonesia***

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wakaf terdiri terdiri dari dua jenis:

1. Wakaf khusus, seperti kepada anak atau kerabat yang dikenal dengan *Wakaf al-Ahly* atau disebut juga *wakaf al-zuhry*.
2. Wakaf *Khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau kemaslahatan umum.<sup>15</sup>

Menurut historis wakaf *Ahly* muncul pada saat peristiwa wakaf yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Abu Thalhah atas petunjuk Rasulullah Saw, Abu Thalhah mewakafkan kebun kurmanya kepada seorang yang bernama Biaraha yang juga sebagai sanak keluarga Abu Thalhah.

Sedangkan wakaf *Khairi* muncul ketika peristiwa wakaf yang dilakukan oleh Usman bin Affan. Pada waktu itu Usman bin Affan membeli mata air Raumah dari seorang sahabat yang berasal dari Bani Ghiffar, kemudian Usman Bin Affan mewakafkan kepada kaum muslimin.

Jenis wakaf *Khairi* ini sifatnya umum. Dalam artian, tujuan wakaf *Khairi* diperuntukkan kepada orang banyak (khalayak) atau kepada seluruh ummat yang membutuhkannya, ini salah satu jalan untuk memanfaatkan harta di jalan Allah Swt dan juga ketika di lihat dari berbagai aspek, wakaf merupakan salah satu sarana untuk menunjang kehidupan masyarakat baik dibidang agama, sosial, ekonomi dan juga pendidikan.

---

<sup>15</sup> Aliy As'ad, Fathul Muin, Jilid II (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), h. 345

## 1. *Wakif* atau orang yang mewakafkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat 2 Jo pasal 215 ayat dua disebutkan bahwa *wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun syarat-syarat *wakif* adalah:

- a. Memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan *tabarru'* artinya berakal sehat, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau di paksa dan telah mencapai usia baligh.<sup>16</sup>
- b. Berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun.<sup>17</sup>
- c. Pewakaf haruslah pemilik, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>18</sup>

Dalam penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa seorang *wakif* itu tidak paten cuma diperuntukkan kepada yang Islam saja, orang non-Islampun dapat melakukan *wakif* sepanjang melakukannya sesuai dengan doktrin atau cara-cara berwakaf menurut Islam dan juga menurut paham perUndang-Undangan wakaf yang berlaku.

## 2. *Mauquf* atau Benda yang di Wakafkan

Dalam KHI pasal 215 ayat 4 dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda, baik itu bergerak atau tidak bergerak yang memiliki sifat tahan lama yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Benda wakaf dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Bandung : Al-Ma'arif, 1973), h. 153

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 1993

<sup>18</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. II ; Jakarta : Pimeka Cipta, 2001), h. 497



- a. Sesuatu yang jelas dan tertentu
- b. Milik sepenuh wakif dan tidak terkait dengan hak orang lain.
- c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.<sup>19</sup>
- d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu.<sup>20</sup>
- e. Boleh mewakafkan benda yang bukan tanah asalkan berwujud benda yang tidak habis bila di konsumsi, yang penggunaannya tidak bertentangan dengan syarat.<sup>21</sup>
- f. Hendaknya wakaf itu pada asal yang wujud atau *far'in* (keturunan) yang tidak terputus.<sup>22</sup>

### 3. *Maukuf Alaihi* atau Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *maukuf alaihi*, harus jadi dan di syaratkan sebagai berikut:

- a. Harus hadir sewaktu penyerahan wakaf.
- b. Harus ahli untuk memiliki yang diwakafkan.<sup>23</sup>
- c. Hendaknya tidak untk hal-hal yang buruk/ kepentingan yang terlarang.<sup>24</sup>
- d. Untuk kepentingan umum.<sup>25</sup>

<sup>19</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya* (Cet. II ; Jakarta : Sinar Grafita, 2005), h. 79

<sup>20</sup> Abdul Hakim. *op. cit.*, h. 20

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid VI (Cet. VI ; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hauve, 1996), h. 105

<sup>22</sup> Andi Tahir Hamid. *op. cit.*, h. 79

<sup>23</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Mahammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Cet. II ; Surabaya : Bina Iman, 1995), h. 720

<sup>24</sup> Abdul Hakim, *op. cit.*, h. 18

<sup>25</sup> Syekh Syamsuddin Abdillah, *Fathul Qarib al-Mujib* (Surabaya : Mutiara Ilmu : 1995), h.

#### 4. *Sighat* atau Ikrar Wakaf

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 Pasal 3 Jo KHI pasal 215 ayat 3 disebutkan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. *Shigat* wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kata-kata “*Aku wakafkan*” atau “*Aku menahan*” atau kalimat yang senada dari pernyataan ikrar tersebut. Adapun syarat-syarat *sighat* wakaf, yaitu:

- a. *Sighat* itu tidak digantungkan.
- b. Tidak diiringi syarat tertentu.
- c. *Sighat* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>26</sup>
- d. Tidak menyandang pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan.<sup>27</sup>
- e. Tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas.

#### 5. *Nazhir* wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 5 Jo Undang-undang Perwakafan Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa *nazhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

---

<sup>26</sup> Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 86

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 497

Menyangkut peruntukan obyek atau benda wakaf, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 menyatakan bahwa, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan dan pengembangan obyek atau benda wakaf, *nadzir* baik yang berbentuk perorangan maupun yang berbentuk badan hukum dapat merealisasikan dan mengaplikasikan prinsip manajemen kontemporer dengan menjunjung tinggi dan memegang kaidah *al-Maslahah* (kepentingan umat) sesuai ajaran Islam, sehingga obyek wakaf dapat di kelola secara efektif, efisien dan professional. Sehingga *nadzir* sebagai manajer perlu melakukan usaha serius dan mempunyai langkah terarah dalam mengambil kebijakan berdasarkan program kerja yang telah disusun dengan rapi sehingga kesan dan animo masyarakat menganggap bahwa dalam pengelolaan harta wakaf itu hanya dilakukan dengan asal-asalan bisa ditepis dan dapat dihilangkan.

Ada beberapa alasan dimana kendala aspek formil tersebut menjadi hambatan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal, yaitu:

1. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Pengintegrasian peraturan dalam undang-undang perwakafan dilakukan agar wakaf dapat tertangani secara terpadu dan maksimal. Seperti diketahui bahwa di negeri muslim lainnya seperti Mesir telah ada Qanun No. 46 Tahun 1946 yang mengatur seluruh potensi dan pengelolaan wakaf secara umum dan terus dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap berdasarkan Syariat Islam. Sehingga wakaf di Mesir berkembang secara dinamis dan memberikan dampak sosial ekonomi secara nyata kepada masyarakat banyak.
2. Masih ada kelemahan pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakaf, nazhir, dan mauquf'alaihi (penerima wakaf), baik perseorangan, kelompok orang, organisasi/badan hukum. Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan/atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. Hal ini banyak terjadi pada harta wakaf yang dikelola oleh perseorangan, seperti penggunaan tanah untuk kepentingan pribadi, golongan, bahkan diwariskan kepada keturunannya, sementara bukti perwakafan sulit ditemukan atau bahkan tidak ada, dan lain-lain.

3. Belum maksimalnya sosialisasi pengadministrasian tentang adanya pembuatan sertifikat wakaf, yang sebagai bukti autentik bagi pemegang benda wakaf ketika dilain waktu ada yang mengaku pewaris dari harta benda wakaf tersebut.

### ***C. Tinjauan Yuridis Perwakafan***

Dalam tinjauan yuridis tentang wakaf ini, penyusun hanya menitik beratkan pada ruang lingkup wilayah:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Uuw)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf (PPW)

Pada Undang-Undang tentang wakaf mendefinisikan wakaf yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk “*memisahkan dan/atau menyerahkan*” sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>28</sup>

Definisi tersebut mengandung 2 makna berbeda, yaitu:

1. Makna kata memisahkan: perwakafan mengenal jangka waktu tertentu (sementara) dan harta benda yang dapat diwakafkan berupa harta benda yang bergerak, misalnya mewakafkan sejumlah uang untuk pendidikan dalam jangka waktu 3 tahun, atau mewakafkan sapi perah untuk diambil

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Uuw) dalam Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 94

susunya, atau mewakafkan pohon mangga untuk diambil buahnya, dan lain sebagainya. Setelah jangka waktu habis, maka harta benda wakaf tersebut akan dikembalikan lagi kepada *wakif* (pihak yang berwakaf).

2. Makna kata menyerahkan: perwakafan tidak mengenal jangka waktu (selamanya) dan yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Adapun unsur wakaf yang merupakan segala keharusan ketika melakukan perwakafan dan ketika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang melakukan perwakafan, maka perwakafan pun batal demi hukum. Artinya, perawakafan tersebut dianggap tidak ada dari awal sebab tidak memenuhi unsur.

Unsur-unsur wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004:<sup>29</sup>

1. *Wakif*, yaitu pihak yang berwakaf. Sesuai yang tertuang pada undang-undang wakaf pasal 7-8, berbunyi:

UNIVERSITAS PALU NEGERI

Pasal 7

Wakif meliputi: (a) perseorangan; (b) organisasi; dan (c) badan hukum”.

M A K A S A R

Pasal 8

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: (a) Dewasa; (b) berakal sehat; (c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan (pemilik sah harta benda wakaf). 2. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 3. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 96

dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Wakif perorangan juga dapat menitipkan harta benda wakaf kepada wakif organisasi ketika wakif perorangan tidak sanggup memenuhi tehnik secara prosedural perwakafan, agar supaya benda wakaf dapat memenuhi secara sah sebagai benda yang diwakafkan.

2. *Nazhir*, yaitu pihak yang ditunjuk wakif untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya. Hal ini tertuang pada undang-undang wakaf pasal 9-14, berbunyi:

#### Pasal 9

Nazhir meliputi: (a) perseorangan; (b) organisasi; (c) badan hukum”

#### Pasal 10

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : (a) Warga Negara Indonesia; (b) Beragama Islam; (c) Dewasa; (d) Amanah; (e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan (f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum”. 2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : (a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1; dan (b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam. (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : (a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1; (b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

### Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas : (a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan (d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

### Pasal 14

1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri atau Badan Wakaf Indonesia. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menyimak dari pasal 9-14 Undang-undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004, yang terpenting dilakukan oleh seorang atau lembaga Nazhir yaitu melaksanakan tugas-tugasnya secara konsisten, hal ini tertuang dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. *Harta Benda Wakaf*, yaitu harta yang diwakafkan dengan syarat tertentu. Sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang wakaf Pasal 15-16, yakni:



### Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

### Pasal 16

1. Harta benda wakaf terdiri dari: (a) Benda tidak bergerak; dan (b) Benda bergerak. 2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi : (a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (d) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : (a) Uang; (b) Logam mulia; (c) Surat berharga; (d) Kendaraan; (e) Hak atas kekayaan intelektual; (f) Hak sewa; dan (g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta benda yang akan diwakafkan oleh wakif harus mempunyai bukti kepemilikan yang sah agar kedepannya tidak terjadi sengketa oleh ahli waris wakif. Harta benda yang diwakafkan oleh wakif tidak boleh habis, baik karena dikonsumsi maupun terakan oleh waktu akibat dari kurangnya perawatan oleh wakif.

4. *Ikrar Wakaf*, yaitu pernyataan lisan/tulisan tentang kehendak wakif untuk berwakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang wakaf Pasal 17-21, berbunyi :

### Pasal 17

1. Ikrar Wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi 2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

### Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

### Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

### Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan : (a) Dewasa; (b) Beragama Islam; (c) Berakal sehat; dan (d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

### Pasal 21

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf; 2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : (a) Nama dan identitas Wakif; (b) Nama dan identitas Nazhir; (c) Data dan keterangan harta benda wakaf; (d) Peruntukan harta benda wakaf; dan (e) jangka waktu wakaf. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ikrar untuk mewakafkan atau menyerahkan harta benda untuk kegiatan ibadah, memang seharusnya dihadiri oleh saksi yang akan dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan wakif, apalagi diperkuat dengan adanya kehadiran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mendengarkan ikrar wakif dan memberikan suatu bukti kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf akan dibaca oleh wakif sesuai yang tercantum pada Akta Ikrar Wakaf (AIW).

5. *Peruntukan harta wakaf*, yaitu sasaran dan tujuan wakaf yang disampaikan wakif saat mengucap ikrar wakaf, sebagaimana dalam undang-undang wakaf Pasal 22-23, berbunyi :

#### Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi : (a) Sarana dan kegiatan ibadah; (b) Sarana dan kegiatan pendidikan serat kesehatan; (c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; (d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan (e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

1. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikra wakif. 2. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Sesuai dengan peruntukkan wakaf, maka wakaf diperuntukkan pada baik peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal itu akan terwujud dengan secara maksimal tergantung keuletan Nazhir yang diamanahkan sebagai pemegang harta benda wakaf. Karena hal yang mendasar suksesnya perwakafan yaitu kinerja Nazhir yang dapat mempertahankan harta benda wakaf baik karena adanya persengketaan maupun peruntukan wakaf yang dapat dipakai terus menerus tanpa habis.

#### 6. *Jangka waktu wakaf*

Suatu perwakafan hanya akan sah ketika di laksanakan menurut syariah. Wakif menyampaikan maksud dan keinginannya untuk wakaf dengan pertama-tama

menunjuk *nazhir* yang nantinya akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah satu diantara ketiganya akan diangkat menjadi ketua. Harta benda yang akan diwakafkan pun harus merupakan harta benda yang bersih serta halal cara mendapatkannya dan bukan merupakan suatu harta yang disengketakan. Harta benda tersebut juga harus memiliki nilai ekonomis sesuai syariah, berdaya tahan lama, mengandung manfaat jangka panjang, serta dikuasai dan dimiliki secara sah oleh wakif.<sup>30</sup>

Setelah *Nazhir* ditunjuk, Wakif mengucapkan ikrar wakafnya dalam suatu Majelis Ikrar Wakaf. Pihak-pihak yang harus hadir dalam Majelis Ikrar Wakaf adalah Wakif, *Nazhir*, PPAIW, Mauquf Aliah (pihak yang akan menerima manfaat dari peruntukan wakaf), serta 2 orang saksi yang sah.

Setelah ikrar wakaf disampaikan Wakif kepada *Nazhir* dihadapan PPAIW dengan dihadiri oleh 2 orang saksi serta Mauquf Alaih, maka ikrar wakaf dimuat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Ikrar wakaf diterima Mauquf Alaih, dan harta benda wakaf diterima oleh *Nazhir* untuk dikelola dan diambil manfaatnya oleh Mauquf Alaih. Salinan Akta Ikrar Wakaf yang telah ditanda tangani pihak-pihak yang berkepentingan dan telah disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dibawa ke Menterian dan Badan Wakaf Indonesia bersama dengan surat-surat atau tanda bukti kepemilikan lainnya, untuk dilakukan register wakaf umum. Setelah itu, akan turun sertifikat wakaf yang akan disampaikan ke *Nazhir* dan Wakif melalui PPAIW.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-Undang wakaf

Akan tetapi, data terakhir dari Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu total jumlah 67,22% atau 282.321 bidang tanah sudah bersertifikat wakaf dari 420.003 bidang tanah wakaf. Melihat dari data tersebut terdapat 137.682 bidang tanah yang belum bersertifikat, ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Wakaf baik dari pemerintah maupun lembaga yang bersangkutan. Walaupun ketika tugas Nazhir salah satunya yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf (Pasal 11 huruf a), tanpa ada prosedur yang diketahui sebagai pemenuhan mutlak bahwa benda tersebut menjadi wakaf yang wakif telah amanahkan kepada Nazhir.

Dengan melihat problematika diatas, maka seharusnya pejabat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pembuat akta atau bukti atas benda yang telah diwakafkan yang berupa ikrar wakaf lebih memaksimalkan kinerjanya untuk mensosialisasikan prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), agar benda wakaf tidak lagi menimbulkan permasalahan.

## **BAB IV**

### **SENKETA WAKAF DAN PENYELESAIANNYA**

#### ***A. Penyebab Terjadinya Sengketa Perwakafan di Indonesia***

Pentingnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selaras menjadi kepedulian para pengelola lembaga wakaf di Indonesia. Mayoritas setuju dengan upaya melakukan penanganan ketidakadilan sosial melalui perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik yang tidak adil. Berbagai persoalan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan yang rendah, masih menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Dengan mengatasi berbagai persoalan sosial sampai ke akarnya, perubahan sistem dan struktur sosial yang tidak adil, menjadi harapan baru untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan.

Namun, tentu saja hal ini tidak mudah mengingat penyelesaian ketidakadilan sosial juga membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, utamanya negara dan pasar agar mereka adil dalam mendistribusikan segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lembaga wakaf utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini amat wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga *endowment* (penyumbang) masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi.

Membiayai berbagai upaya keadilan sosial melalui wakaf amat mungkin dilakukan, baik dalam level yang paling sederhana seperti memenuhi kebutuhan dasar maupun upaya lain seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Pada tingkat persepsi, masyarakat pengelola wakaf optimis inisiatif-inisiatif keadilan tersebut bisa dilakukan. Namun, dalam praktiknya, jangankan untuk membiayai persoalan peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan, pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial saja masih sangat jarang dilakukan.

Dalam kaitan hal ini, realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf muncul kepermukaan dan juga berpindah tangan menjadi milik pribadi orang yang dipercaya mengelolanya atau dialihkan ke organisasi lain yang berbentuk kepentingan pribadi, misalnya tanah wakaf untuk keperluan untuk suatu lembaga pendidikan, seperti madrasah atau pesantren, ironisnya sudah disertifikasi atas nama yang menerima amanat tersebut ataukah suatu bangunan hasil wakaf umat Islam menjadi kekayaan turun temurun seseorang.

Pada masa lalu orang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya didasari dengan kepercayaan dan rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan dalam literatur fikih tidak harus tertulis. Apalagi sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik, sementara perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk akta ikrar wakaf.

Obyek wakaf di wilayah Indonesia terbentang sangat luas, data terakhir dari Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2012 memperlihatkan obyek wakaf di

Indonesia tersebar di 420.003 lokasi dengan luas 3500 kilometer persegi, dari total jumlah tersebut 67,22% atau 282.321 bidang tanah sudah bersertifikat wakaf.<sup>1</sup>

Data yang dikutip di atas memperlihatkan banyak obyek wakaf yang tidak sedikit dari obyek wakaf tersebut belum disertifikatkan. Pada masa dahulu, perubahan status obyek yang diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak oleh Nazhirnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum, dan sebagainya) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan harta diwakafkan sebagai badan hukum.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat dahulu hanya merupakan pemindahan hak atas dasar kepercayaan dan keikhlasan, baik terhadap benda-benda bergerak maupun benda-benda yang tidak bergerak, sehingga sengketa wakaf dapat terjadi diantara Wakif dan Nazhir, dan dapat pula terjadi antara Nazhir dengan pihak ketiga seperti ahli waris wakif.

Dilihat dari permasalahan sengketa wakaf diatas, maka sebagai abdi Negara atau sebagai pemegang tongkat kedamaian dalam kekuasaan kehakiman, sebagai Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam memposisikan dirinya untuk mengambil jalan tengah dengan bijak yaitu dengan melihat sengketa wakaf, kemudian disandarkan dengan Undang-undang yang berlaku.

Peran Hakim Pengadilan Agama disini yaitu melihat sengketa wakaf dalam pranata sosial dengan menyelesaikannya atas dasar undang-undang yang berlaku kemudian mensinyalir kembali dalam masyarakat yaitu benda wakaf yang belum

---

<sup>1</sup> <http://kliping.kemenag.go.id/download.php?file=10062>



mempunyai bukti hak milik atas benda tersebut ataukah belum mempunyai bukti bahwa benda tersebut telah diwakafkan, yang kemudian diusulkan untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 yaitu mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya untuk memperoleh bukti autentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa dikemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan.

Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa benda-benda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya hubungan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut.

#### ***B. Langkah-langkah Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perwakafan***

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan obyek semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama, sehingga untuk mengamankan dan melindungi obyek-obyek wakaf secara nasional diseluruh wilayah nusantara. Tujuan lainnya adalah terjaminnya ketertiban wakaf umat Islam. Oleh karena itu, seetiap obyek wakaf harus dicatat.

Dalam pembahasan langkah-langkah Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perwakafan ini, penyusun menitik beratkan pada wilayah

langkah pengamanan Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perwakafan.

Hal yang perlu dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama agar obyek wakaf yang ada itu diamankan sedemikian rupa, sehingga obyek-obyek tersebut tidak jatuh ketangan atau ke pihak-pihak yang tidak berhak, yang mungkin bersifat merebut atau mengambil dengan paksa terhadap obyek-obyek wakaf. Maka untuk melindungi obyek-obyek wakaf tersebut, yang mendesak dilakukan adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap obyek wakaf dan juga sebagai langkah-langkah Hakim Pengadilan Agama dalam melihat perkara perwakafan, yaitu:

*Pertama*, Hakim Pengadilan Agama mendeteksi wilayah wakaf diberbagai masyarakat sekitar, agar supaya memberikan kabar atau info tentang pengadaan sertifikat harta benda yang telah diwakafkan. Karena, harus diakui bahwa banyak obyek wakaf yang jatuh ketangan atau pihak-pihak yang tidak berhak atau yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap obyek-obyek yang memiliki status wakaf. Pada pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar obyek-obyek wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai peoblematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum.

Secara teknis, kelengkapan berkas-berkas pembuatan sertifikat obyek wakaf memang membutuhkan keteguhan para Nazhir wakaf dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan, salah satu diantaranya yaitu Hakim Pengadilan Agama yang memberikan penjelasan tata cara melengkapi

berkas sertifikat wakaf, kemudian peran Badan Perobyekan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah agar memudahkan proses berkas pembuatan sertifikat wakaf. Peran BPN sangat signifikan dalam usaha memudahkan proses pembuatan sertifikat obyek, peran Hakim Pengadilan Agama disini yaitu bagaimana melihat data-data autentik untuk menyelesaikan perkara perwakafan. Sedangkan peran Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah dalam kerangka otonomi daerah juga sangat penting dalam ikut menanggulangi pembiayaan sertifikat, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan obyek-obyek wakaf yang ada. Oleh karena itu, perlu ada publikasi terhadap pentingnya sertifikat obyek wakaf secara *continue* dan gencar agar sisa obyek yang belum disertifikasi segera mendapatkan posisi hukum secara pasti melalui sertifikat obyek.

*Kedua*, Hakim Pengadilan Agama berupaya memberikan advokasi secara penuh terhadap obyek-obyek wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. Dukungan advokasi ini melibatkan banyak pihak, seperti pihak Nazhir wakaf, pemerintah, ahli-ahli hukum yang peduli terhadap obyek-obyek wakaf dan masyarakat banyak. Pemberian advokasi ini harus dilakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Titik tekan keterpaduan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh, karena dalam menyelesaikan persoalan hukum, apalagi menyangkut persoalan obyek yang sangat sensitif, terakit erat dengan rasa keadilan materiil dan formil yang memerlukan kekompakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian pencapaian dalam pengamanan obyek-obyek wakaf dapat terpenuhi sebagaimana mestinya atau peruntukannya.

*Ketiga*, langkah yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama untuk kesuksesan obyek wakaf yaitu lebih memaksimalkan kerjasama antara perangkat daerah yang telah ditunjuk sebagai PPAIW tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahnya, yang ditujukan baik kepada lembaga pendidikan, kesehatan, tempat ibadah seperti masjid atau mushollah dan hal-hal yang dapat menjadi peruntukkan wakaf tersebut. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan wakaf tersebut sangat penting bagi perlindungan obyek-obyek wakaf secara umum yang akan mempunyai landasan hukum atau bukti autentik ketika obyek wakaf tersebut ada lain pihak menyengketakannya. Karena perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan obyek-obyek wakaf secara maksimal dapat dilakukan tanpa adanya kendala.

*Keempat*, Hakim Pengadilan Agama memberikan pemahaman penuh kepada masyarakat yang akan melakukan suatu perwakafan atau yang telah melakukan wakaf yaitu Hakim Pengadilan Agama memberikan penjelasan pemanfaatan dan pemberdayaan obyek-obyek wakaf, bahwa wakaf itu tidak hanya diperuntukkan hanya pada pembangunan rumah ibadah atau tempat bangunan sekolah dan pondok pesantren, tapi juga dapat diperuntukkan pada hal-hal yang dapat menjadikan wakaf itu produktif. Disamping pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukkan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat obyek wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya.

*Kelima*, Hakim Pengadilan Agama lebih memaksimalkan pemeriksaan berkas-berkas yang berperkara.

Kelima langkah-langkah yang telah dipaparkan untuk menjauhi agar wakaf tidak bersengketa, dalam artian pengamanan terhadap obyek-obyek wakaf harus segera dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai peruntukan wakaf tersebut.

### ***C. Pandangan Undang-Undang mengenai perkara perwakafan***

Dalam wacana fikih tentang perwakafan menjelaskan bahwa *wakif* boleh mewakafkan sesuatu walaupun dengan pengucapan ikrar lisan dan tidak apa-apa ketika melakukannya tanpa tertulis. Akan tetapi, ketika dilihat dari pergolakan era atau jaman sekarang yang dimana nilai materiil makin hari makin melambung tinggi, sehingga nafsu serakah pada setiap orang terpancing akan nilai materil tersebut, maka dari itu banyak obyek wakaf yang berperkara atau disengketakan lantaran tidak adanya bukti bahwa obyek tersebut telah diwakafkan.

Dalam hal ini peta yuridis yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Pasal 9, bahwa mengharuskan perwakafan itu dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja yang bertujuan untuk mendapatkan bukti autentik untuk membuat sertifikat wakaf.

Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya pejabat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta (bukti) tersebut dan perlu adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta Ikrar Wakaf (AIW).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Perundang-undangan Perwakafan* (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, h. 151

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juga telah menegaskan pentingnya kepastian hukum akan status obyek, khususnya obyek yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Dalam Pasal 19 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah di adakan pendaftaran obyek diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1, Pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan obyek
  - b. Pendataran hak-hak atas obyek dan peralihan hak-hak tersebut.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

RM. Sudikno Mertokusumo, memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungan secara benar, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara adil. Dalam menegakkan hukum, menurut Sudikno, ada 3 unsur yang tidak boleh tidak harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>3</sup>

Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara adil, setiap orang mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993) h.1

konkret. Bagaimanapun hukumnya, maka itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, sebagaimana sebuah pepatah menyatakan “meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan”.

Perlindungan hukum terhadap obyek wakaf telah secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 49 ayat 3 bahwa “Perwakafan Obyek Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Untuk memenuhi ayat 3 Pasal 49 tersebut pengaturan lebih lanjut dimuat didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Namun akibat perkembangan sosial dan dampaknya terhadap penerapan ketentuan hukum positif, maka adanya pembaruan aturan-aturan hukum merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya, Pasal 226 KHI menyebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan Nazhir di ajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan Nazhir.

Dalam menyelesaikan perkara perwakafan ditegaskan dalam Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dan pada penjelasan Pasal tersebut berbunyi:

“Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syari’ah. Dalam hal badan arbitrase syari’ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka

sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah".<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

"Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang-bidang : a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah dan i) Ekonomi Syari'ah". Dengan demikian sengketa jenis apapun yang berkaitan dengan wakaf, sebaiknya diselesaikan oleh Peradilan Agama.

Demikian pula halnya, apabila Pasal 7 ayat 2 KHI dianalogikan kepada isbat wakaf, maka obyek wakaf, bila tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf (AIW), seharusnya dapat juga mengajukan isbat wakafnya ke Pengadilan Agama. Dan untuk menyempurnakan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perselisihan tentang benda wakaf dan Nazhir, perlu disiapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan *voluntair* (isbat wakaf) kepada lembaga Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (UUW) dalam Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007) h. 125



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan yang didasari dari rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Peran Hakim dalam membentengi bidang wakaf ini dengan kekuatan hukum yang telah ada kemudian diaplikasikan semaksimal mungkin, agar para penyeleweng harta benda wakaf jera terhadap apa yang telah dilakukannya.
2. Dari sistem perwakafan di Indonesia, melihat dari obyek wakafnya tersebar 420.003 lokasi dengan luas 3500 kilometer persegi, dari total jumlah tersebut 67,22% atau 282.321 lokasi atau bidang tanah sudah bersertifikat wakaf, maka masih ada 32,28% atau 137.682 lokasi atau bidang tanah yang belum bersertifikat wakaf. Data Kementerian Agama RI tahun 2012 ini memperlihatkan bahwa obyek wakaf yang belum bersertifikat mempunyai suatu kendala dalam memperoleh sertifikat itu. Ini adalah satu bukti bahwa baik UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan KHI tentang Hukum Wakaf belum terealisasi secara maksimal, salah satu penyebabnya adalah Nazhir yang hanya ditunjuk oleh wakif belum tahu tentang tatacara pengadministrasian perwakafan.
3. Langkah-langkah yang Hakim Pengadilan Agama harus lakukan yaitu memaksimalkan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004, agar penerima wakaf (nazhir) harus menggunakan harta benda wakaf sesuai peruntukannya

4. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka jelas bahwa adanya peraturan yang dapat melindungi keberadaan obyek wakaf bukan lagi sebagai kebutuhan melainkan juga keharusan dan mutlak diperlukan, agar obyek wakaf terjaga kelestariannya serta dapat lebih ditingkatkan fungsinya. Kelahiran dan pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), diharapkan semakin dapat memperkuat dan melindungi obyek wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

## ***B. Saran***

Dengan adanya uraian-uraian atau paparan yang telah dijelaskan pada BAB demi BAB dan mencapai suatu kesimpulan dan sungguh merupakan suatu ketidakmungkinan ketika penyusun yang sadar diri mempunyai keilmuan yang minim untuk memberikan masukan atau saran yang ditujukan pada judul skripsi ini. Akan tetapi, walaupun demikian penyusun akan memberikan sedikit ide-ide karena suatu hal yang tidak wajar ketika penyusun telah mengambil jalan untuk mendalami permasalahan pada skripsi ini dan tidak mempunyai tanggungan untuk menyusun pola perubahan kedepannya.

Sesuai dengan pendapat atau pandangan diatas, maka penyusun memberikan masukan atau saran-saran yang mungkin bisa dilaksanakan:

1. Hakim adalah seorang pemegang singgasana keadilan, yang tidak hanya memikirkan suatu perkara dengan memainkan palu keadilan saja, akan tetapi mengedepankan fikiran yang bijak dalam mencapai kedamaian bak pohon kelapa yang multifungsi. Dalam artian Hakim Pengadilan Agama diharuskan atau sewajarnya berperan sebagai orang professional menjalani amanah yang diembannya yaitu bersifat sosiokratis yang mampu berfikir secara integral.
2. Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mampu berfikir realistis. Artinya, dengan tidak mengabaikan kerangka ideal dan tujuan umum dari upaya penegakan Hukum Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu jalur pemikiran yang mampu menjembatani aspek ideal dan aspek praktis, karena upaya penegakan Hukum Islam bersifat praktis, yaitu yang di ilhami kerangka ideal dan bergerak menurut garis rencana serta program sebagai jembatannya, maka jembatan yang tepat adalah beranjak dari realitas.
3. Hakim Pengadilan Agama harus memahami upaya penegakan Hukum Islam dalam lingkup Perwakafan baik skala lokal maupun global. Yang lebih penting lagi, yaitu intensitas peranan yang mendalam tentang perwakafan atas situasi dan kondisi yang berada di dalam lingkup kekuasaannya. Dalam meningkatkan intensitas pemahaman terhadap situasi dan kondisi tersebut, maka dibutuhkan sifat kejelian seorang Hakim

Pengadilan Agama yaitu melakukan suatu observasi lapangan untuk melihat dan mendata langsung tanah yang telah diwakafkan tapi belum mempunyai sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga masyarakat tidak lagi khawatir ketika kedepannya akan terjerumus dalam persengketaan karena telah mempunyai bukti autentik.

4. Hakim Pengadilan Agama diharuskan menjaga kewibawaannya sebagai seorang hakim yang jabatannya merupakan suatu amanah menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran dengan menyebarluaskan atau mensosialisasikan suatu landasan hukum mengenai perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 yang kemudian menjadi landasan utama untuk menuju sebuah pembuktian secara legalitas ketika muncul suatu persengketaan di dalam pengelolaan harta atau benda wakaf, sehingga menghasilkan keadilan yang makmur dan makmur dalam keadilan.
5. Yang terpenting dalam sosialisasi peraturan perwakafan yaitu tentang pengadministrasian perwakafan dan pidana bagi siapapun yang menyelewengkan harta benda wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- As'ad Aliy, *Fathul Muin*, Jilid II, Yogyakarta : Menara Kudus, 1979
- Ali Daud H.M., *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), Latar Belakang, Tujuan dan Prospek Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- , *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982
- Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib al-Mujib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Maulana, Ali Muhammad, *Islamologi (Dinul Islam)*, alih bahasa R. Kaelan, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1980
- Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Nasabury, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th
- Cik, Bisri Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, Cet VI; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hauve, 1996
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priyono, Jakarta: LP3ES, 1990
- Dikutip dari Makalah Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, disampaikan pada kuliah umum Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Samata-Gowa, Tanggal 21 Oktober 2011.
- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, Jakarta, Direktur Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Departemen Kebudayaan, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008
- Efendi Deden, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985
- Hakim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005
- Hamid, Andi Tahir, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafita, 2005

- Haq Faizal dan Anam Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Cet I, Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1994
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid II, Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995
- Jimmy, Sembiring Joses, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Cet. I; Jakarta Selatan : Visimedia, 2010
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992
- Mintaredja Syafaat, *Islam dan Politik dan Negara di Indonesia: Sebuah Renungan Pembaharuan dan Pemikiran*, Jakarta: Septanarius, 1976
- Mugniah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo A., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. I; Jakarta: Khalifa, 2005
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet. I; Bandung: Al-Ma'arif, 1973
- Rahardjo Sutjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979
- Soekanto Soerjono, *Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum*, Analisis Pendidikan, No. 02 Th. IV, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983
- , *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni, 1982
- Soimin Sudaryo, *Status Hak dan Pembahasan Tanah*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Pimeka Cipta, 2001
- Ash Sidiqi Hasbi Muhammad Tengku, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Cet. I; Surabaya: Gitamedia Press, 2006
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2008

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

Undang-Undang Peradilan Agama Edisi Terbaru, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Karina, 2004

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UW) dalam Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007

Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang Wakaf

